



BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2022





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2022.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini sebagai rancangan teknokratik atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan pada Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2022-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sesuai dengan visi dan misi Bupati Kotabaru terpilih periode tahun 2022-2026 yang akan dituangkan dalam RPJMD.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Kotabaru,

KEPALA BADAN ,



Drs. H MINGGU BASUKI, MAP
NIP.19731115 199302 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rumusan Program dan kegiatan	66
BAB V PENUTUP	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021
Tabel 2.2.1	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2.2	:	Cakupan data di masing masing bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru
Tabel 2.4	:	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Tabel 2.5	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Tabel 3.1	:	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Kotabaru
Tabel 3.2	:	Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru
Tabel 4.1	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 & Perkiraan Maju Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 : Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah merupakan rencana tahunan yang berjangka 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru tahun 2022.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2022-2026.

Rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 memberi gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru selama Tahun Anggaran 2021, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.



Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

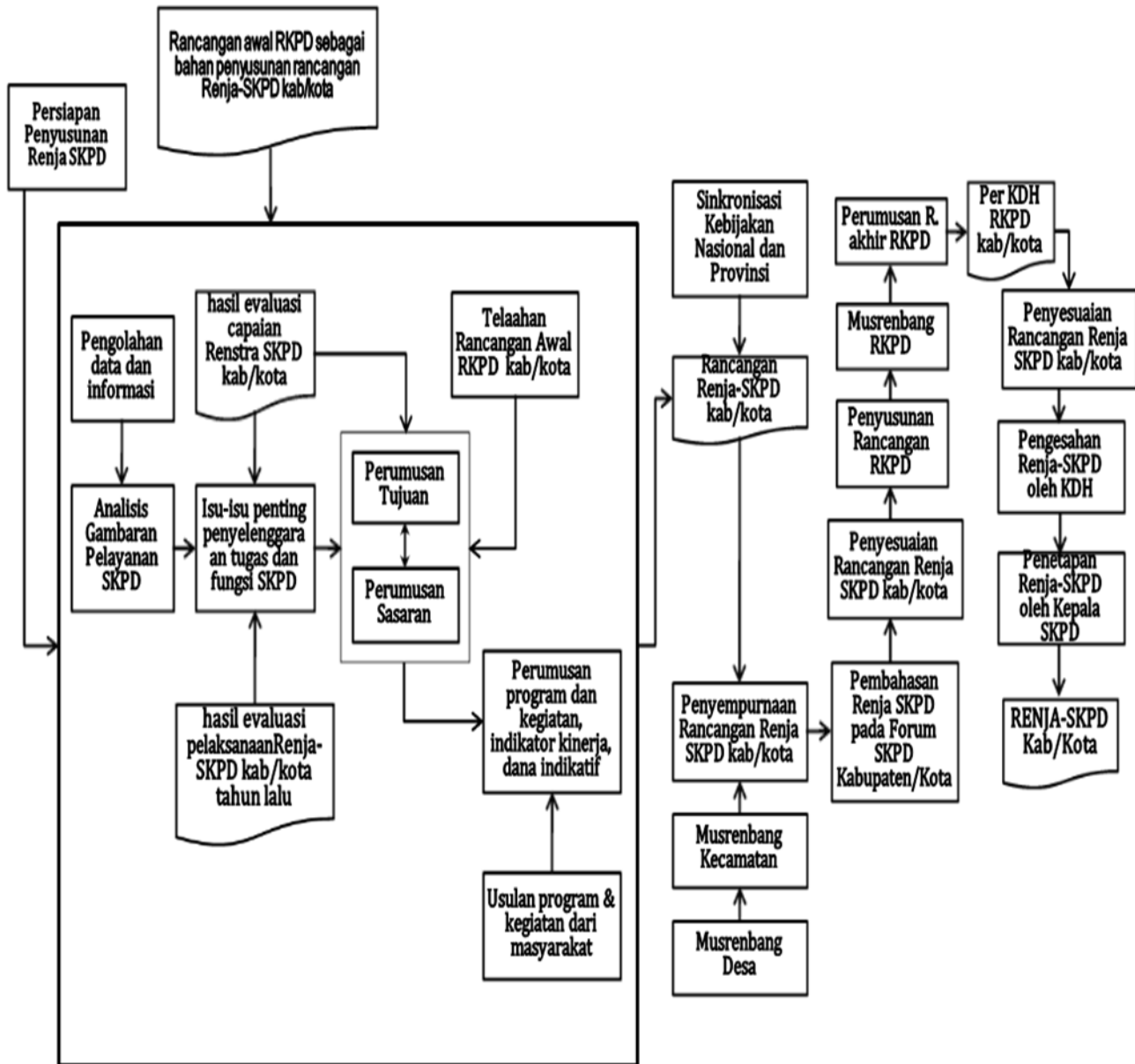
Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai Sub Sistem dari penyelenggaraan Pemerintah dituntut mampu menjabarkan visi tersebut yang mana setiap tahun diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 yang akan datang.

Bagan alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari bagan berikut ini.

Gambar 1.1

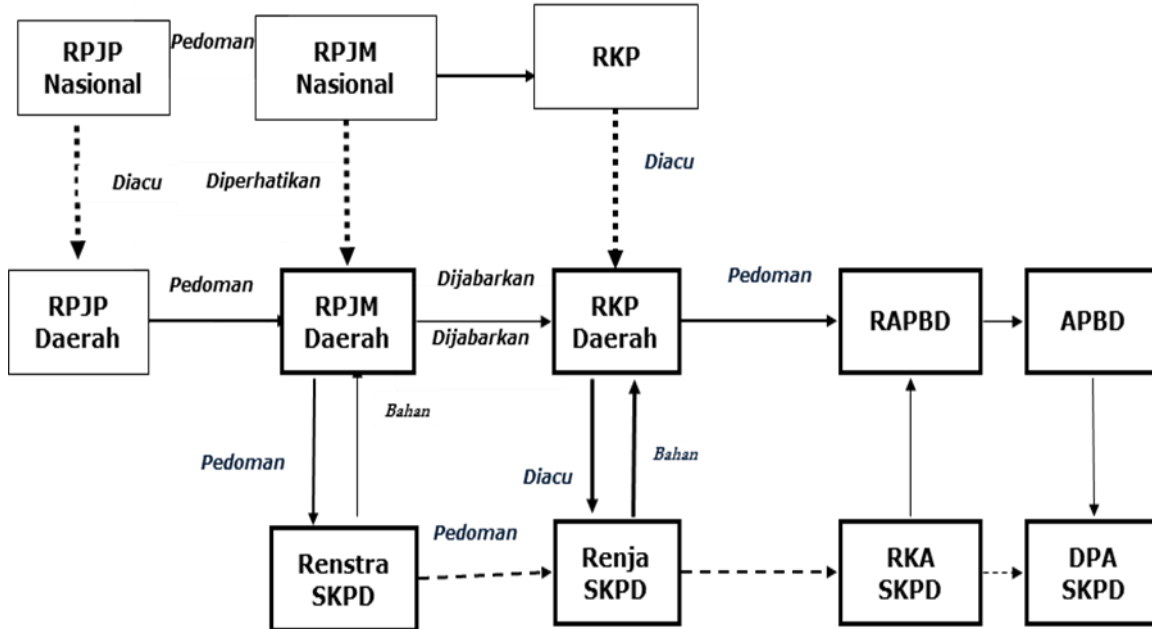
Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini.

Gambar 1.2

keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD



1.2 LANDASAN HUKUM

Renja BKPSDM Kabupaten Kotabaru 2022 merupakan rencana kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang



Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496).

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);



2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Bupati

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 149);



3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2020 Nomor 146);
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 12)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2022.

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2022 – 2026 Tahun ke-1.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;



3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rumusan program dan kegiatan
- 4.2 Rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2021 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kotabaru mengelola 7 Program dan 47 kegiatan yaitu:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- j. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- k. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- l. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- m. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- n. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran/ Keamanan
- o. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
- p. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda
- q. Kegiatan Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- a. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
- e. Penyusun Instrumen/ kelengkapan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
- b. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
- c. Kegiatan Penempatan PNS



- d. Penataan System Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
- e. Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
- f. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
- g. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
- h. Pemrosesan Pensiun Pegawai
- i. Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul)
- j. Kegiatan Pengangkatan dan Pemindahan pegawai ASN
- k. Penyelenggaraan Diklat Dasar ASN
- l. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

6) Program Pembinaan, Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur

- a. Kegiatan Penanganan Kasus Pelanggaran Displin dan Perceraian
- b. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil
- c. Peningkatan Sistem Kinerja Pegawai
- d. Kegiatan Asistensi Kinerja Pegawai
- e. Kegiatan Fasilitasi Penghargaan Pegawai ASN
- f. Pemrosesan karis, karsu, karpeg dan taspen
- g. Pembinaan Kepribadian Aparatur

7) Program Peningkatan Sistem Informasi dan Fasilitasi Kepangkatan/ Purna Tugas

- a. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Dari data realisasi 7 program dan 47 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ada 3 kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda, berupa penyediaan 1 Iklan di media sosial terkait kegiatan kepegawaian.
- 2) Pemulangan pegawai yang pensiun, berupa penyediaan bantuan bagi pegawai pensiun yang purna tugas dalam daerah maupun luar daerah sebanyak 5 kali bantuan.



- 3) Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas, berupa 1 kali penyediaan bantuan pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
- 4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah berupa diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah disediakan bagi 9 Pegawai.
- 5) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS berupa asesmen bagi PNS yang mengikuti seleksi JPT dan 1 kali rapat tim baperjakat.
- 6) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 1 orang diumumkan kelulusannya pada bulan Desember 2019 sehingga dana tidak dapat dibayarkan.
- 7) Pengangkatan dan Peminangan Pegawai ASN, Belum adanya persetujuan dari PPK untuk melaksanakan seleksi JPT Pratama
- 8) Fasilitas Kenaikan Pangkat ASN, belum terealisasi serapan anggaran keuangan pada subbid kepangkatan dikarenakan defisit anggaran pada BKPPD secara menyeluruh
 - a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 40 kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu 16 kegiatan di program pelayanan administrasi perkantoran, 4 kegiatan di program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3 Kegiatan di Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD, 2 Kegiatan di Program Pendidikan Kedinasan, 2 Kegiatan di Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 8 Kegiatan di Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, 7 Kegiatan di Program Pembinaan, Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur, 1 Kegiatan di Program Peningkatan Sistem Informasi dan Fasilitas Kepangkatan/ Purna Tugas
 - b. Realisasi program/kegiatan yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



- 1) Kegiatan pemrosesan kenaikan pangkat ASN
 - 2) Kegiatan diklat teknis fungsional dan kepemimpinan
 - 3) Pengangkatan dan pemindahan ASN
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan;
- 1) Sehubungan pandemi Covid-19 menyebabkan terlambatnya proses kenaikan pangkat periode April dan Oktober.
 - 2) Pembatasan pelaksanaan diklat fungsional yang diselenggarakan di luar kabupaten sehingga tidak jadi dilaksanakan.
 - 3) Pelaksanaan pelantikan ASN yang telah mengikuti dan lulus seleksi Lelang JPT tidak dapat dilaksanakan sehubungan dilangsungkannya pilkada di Kabupaten Kotabaru
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra;
Terdapat program kegiatan yang melebihi target dari capaian program renstra yang perlu disesuaikan dalam capaian renstra.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 1) Dilakukannya evaluasi secara berkala terkait serapan target fisik dan target keuangan setiap kegiatan
 - 2) Dilakukannya koordinasi dan konsolidasi dengan pihak penyelenggara diklat dan pengembangan kompetensi lainnya secara intensif agar diperoleh penjadwalan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur daerah.
 - 3) Sebagai lembaga teknis pengelola kepegawaian agar meningkatkan konsultasi dengan pejabat pembina kepegawaian daerah untuk percepatan penyelesaian dokumen kepegawaian sesuai SOP yang telah ditentukan.
 - 4) Mengoptimalkan penggunaan media Teknologi Informasi untuk koordinasi dan pengembangan kompetensi pegawai sehubungan kondisi Pandemi yang terjadi di Indonesia.



Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021.



TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 KABUPATEN KOTABARU

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)					
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %				
1	2	3	4		5	6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
4	Urusan Pemerintahan														
4 05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian														
4 05 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya Administrasi kantor													
4 05 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk	10699	Surat Masuk dan Keluar	8493	6.066	Surat Masuk dan Keluar	6.066	Surat Masuk dan Keluar	100,00	3.265	Surat Masuk dan Keluar	17.824	Surat Masuk dan Keluar	166,60
4 05 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320	kali pembayaran rekening	246	62	kali pembayaran rekening	61	kali pembayaran rekening	98,39	73	kali pembayaran rekening	380	kali pembayaran rekening	118,75
4 05 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	83	kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit	60	14	kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit	14	kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit	100,00	14	kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit	88	kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit	106,02
4 05 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan dan dokumen	120	kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)	96	16	kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)	16	kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)	100,00	12	kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)	124	kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)	103,33
4 05 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran tenaga kebersihan kantor	248	orang kali pembayaran	191	23	orang kali pembayaran	23	orang kali pembayaran	100,00	23	orang kali pembayaran	237	orang kali pembayaran	95,56
4 05 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	239	kali jasa perbaikan peralatan kerja	252	117	kali jasa perbaikan peralatan kerja	117	kali jasa perbaikan peralatan kerja	100,00	115	kali jasa perbaikan peralatan kerja	484	kali jasa perbaikan peralatan kerja	202,51
4 05 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	60	kali penyediaan ATK (set)	48	7	kali penyediaan ATK (set)	7	kali penyediaan ATK (set)	100,00	7	kali penyediaan ATK (set)	62	kali penyediaan ATK (set)	103,33



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
4 05 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29 kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)	23	6 kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)	6 kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)	100,00	3 kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)	32 kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)	110,34
4 05 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kali penyediaan komponen Instalasi Listrik dan alat listrik	68 kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)	56	6 kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)	6 kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)	100,00	5 kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)	67 kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)	98,53
4 05 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46 kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)	34	12 kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)	12 kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)	100,00	7 kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)	53 kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)	115,22
4 05 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	60 kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)	48	12 kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)	12 kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)	100,00	12 kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)	72 kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)	120,00
4 05 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makanan minuman harian karyawan, rapat dan jamuan tamu	79910 Kali penyediaan	59985	9.184 Kali penyediaan	9.184 Kali penyediaan	100,00	4.752 Kali penyediaan	73.921 Kali penyediaan	92,51
4 05 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	275 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	229	72 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100,00	45 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	346 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	125,82
4 05 01 01 19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran /Keamanan	jumlah pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	60 jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (1210 tnp)	48	12 jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (1215 tnp)	12 jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (1210 tnp)	100,00	12 jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (1215 tnp)	72 jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (1215 tnp)	120,00
4 05 01 01 21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	333 kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	175	90 kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	90 kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	100,00	60 kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	325 kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	97,60



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
4 05 01 01 22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah iklan/pengumuman yang dipasang di media massa	122 Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan	89	8 Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan	8 Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan	100,00	6 Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan	103 Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan	84,43
4 05 01 01 25	Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	Jumlah pelaksanaan pameran/publikasi dan penyediaan data kepegawaian SKPD	9 kali pelaksanaan pameran	8	- kali pelaksanaan pameran	- kali pelaksanaan pameran	-	- kali pelaksanaan pameran	8 kali pelaksanaan pameran	88,89
4 05 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana								
4 05 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	73 unit/buah	72	- unit/buah	- unit/buah	-	- unit/buah	72 unit/buah	98,63
4 05 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	88 Jenis/unit	105	- Jenis/unit	- Jenis/unit	-	- Jenis/unit	105 Jenis/unit	119,32
4 05 01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	55 unit/buah	35	- unit/buah	- unit/buah	-	- unit/buah	35 unit/buah	63,64
4 05 01 02 11	Pengadaan Buku/ Kepustakaan	Jumlah buku/keputusan yang diadakan	36 buah buku	25	7 buah buku	7 buah buku	100,00	12 buah buku	44 buah buku	122,22
4 05 01 02 22	Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	7 kali pemeliharaan	1	- kali pemeliharaan	- kali pemeliharaan	-	1 kali pemeliharaan	2 kali pemeliharaan	28,57
4 05 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	195 kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)	145	56 kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)	56 kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)	100,00	26 kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)	227 kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)	116,41
4 05 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	220 kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor	211	38 kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor	38 kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor	100,00	19 kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor	268 kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor	121,82
4 05 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	183 unit/buah	109	39 unit/buah	39 unit/buah	100,00	27 unit/buah	175 unit/buah	95,63
4 05 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat disiplin aparatur								
4 05 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	217 stel	162	- stel	- stel	-	- stel	162 stel	74,65



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
4 05 01 03 04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan beserta perlengkapannya	44 baju		baju	- baju	-	baju	- baju	-
4 05 01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik/ sasirangan yang diadakan	228 baju	173	- baju	- baju	-	baju	173 baju	75,88
4 05 01 03 06	Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya	233 stel	177	- stel	- stel	-	stel	177 stel	75,97
4 05 01 04	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Tingkat disiplin aparatur								
4 05 01 04 01	Pemulangan Pegawai yang pensiun	Jumlah pelaksanaan pemulangan pegawai pensiun/ purna tugas	42 PNS	12	6 PNS	1 PNS	16,67	0 PNS	13 PNS	30,95
4 05 01 04 02	Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah penyediaan bantuan pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	5 kali penyediaan	4	1 kali penyediaan	1 kali penyediaan	100,00	0 kali penyediaan	5 kali penyediaan	100,00
4 05 01 04 03	Pemindahan tugas PNS	kali pemindahan tugas PNS	12 kali pemindahan tugas pns		0 kali pemindahan tugas pns	- kali pemindahan tugas pns	-	0 kali pemindahan tugas pns	- kali pemindahan tugas pns	-
4 05 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Memberikan bantuan/fasilitasi untuk pegawai yang pindah/purna tugas								
4 05 01 05 03	Bimbingan teknis impelementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur BKD yang mengikuti bimtek	37 orang /kali		- orang /kali	- orang /kali	-	- orang /kali	- orang /kali	-
4 05 01 05 04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	72 kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	72	6 kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	6 kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	-	6 kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	84 kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	116,67
4 05 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD	Tingkat kualitas laporan kinerja								
4 05 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33 dokumen laporan	28	5 dokumen laporan	5 dokumen laporan	100,00	5 dokumen laporan	38 dokumen laporan	115,15
4 05 01 06 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah dokumen laporan prognosis	5 dokumen laporan	4	- dokumen laporan	- dokumen laporan	-	1 dokumen laporan	5 dokumen laporan	100,00
4 05 01 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	5 laporan dokumen keuangan	4	- laporan dokumen keuangan	- laporan dokumen keuangan	-	1 laporan dokumen keuangan	5 laporan dokumen keuangan	100,00
4 05 01 06 05	Momitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Junlah dokemen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun	26 dokumen laporan	57	8 dokumen laporan	8 dokumen laporan	100,00	7 dokumen laporan	72 dokumen laporan	276,92



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
4 05 01 06 06	Penyusunan Laporan Data Pegawai SKPD	Jumlah dokumen informasi kepegawaian	22 dokumen	15	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	17 dokumen	77,27
4 05 01 32	PROGRAM PROMOSI DAERAH DAN PENYEBARLUASAN HASIL- HASIL PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM	Tingkat partisipasi dalam rangka promosi daerah dan perayaan hari besar								
4 05 01 32 02	Peringatan Hari - hari Besar	Jumlah event kegiatan masyarakat	4 event	3	- event	- event	-	- event	3 event	75,00
4 05 01 50	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Tingkat pendidikan kedinasan yang diikuti								
4 05 01 50 03	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah analisis dan evaluasi penyelenggaraan diklat	1 dokumen		0 dokumen	- dokumen	-	0 dokumen	- dokumen	-
4 05 01 50 06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	jumlah kegiatan peningkatan keterampilan dan profesionalisme	417 orang	305	0 orang	- orang	-	0 orang	305 orang	73,14
4 05 01 50 07	Kerjasama/ kemitraan Penyelenggaraan Diklat	Jumlah kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga	36 kali	32	0 kali	- kali	-	0 kali	32 kali	88,89
4 05 01 51	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	CPNS/PNS yang memiliki pengetahuan ,keterampilan dan sikap profesional,berkompetisi sesuai tingkat jabatan dengan dilandasi etika dan kepribadian PNS pada masing - masing SKPD								
4 05 01 51 01	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD	Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi calon PNS Daerah	3446 orang CPNSD	216	0 orang CPNSD	- orang CPNSD	#DIV/0!	0 orang CPNSD	216 orang CPNSD	6,27
4 05 01 51 02	Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNSD	Jumlah pendidikan dan pelatihan struktural	128 orang	104	0 orang	- orang	#DIV/0!	0 orang	104 orang	81,25
4 05 01 51 03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD	Jumlah pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD	82 kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD	4	0 kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD	4 kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD	#DIV/0!	0 kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD	8 kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD	9,76
4 05 01 51 05	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian yang dilaksanakan	2 kali Pelaksanaan		0 kali Pelaksanaan	- kali Pelaksanaan	-	0 kali Pelaksanaan	- kali Pelaksanaan	-
4 05 01 52	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan aparatur								



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1 20 06 52 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah dokumen rencana pembinaan karier PNS	31 dokumen	25	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	33 dokumen	106,45
4 05 01 52 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dan penempatan PNS	8 Kali pelaksanaan	5	1 Kali pelaksanaan	1 Kali pelaksanaan	100,00	1 Kali pelaksanaan	7 Kali pelaksanaan	87,50
4 05 01 52 03	Penempatan PNS	Jumlah pelaksanaan penempatan /pelantikan PNS	7 kali pelaksanaan pelantikan	5	1065 SK	1.065 SK	100,00	2 kali pelaksanaan pelantikan	1.072 kali pelaksanaan pelantikan	15.314,29
4 05 01 52 04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah PNS yang naik pangkat, ujian dinas, pencantuman gelar, PMK dan Kenaikan Gaji berkala	2 kali pelaksanaan		635 Orang	68 Orang	-	2 kali pelaksanaan	70 kali pelaksanaan	3.500,00
4 05 01 52 05	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah dokumen updating simpeg	1 dokumen		0 dokumen	- dokumen	-	dokumen	- dokumen	-
4 05 01 52 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah dokumen instrumen analisis jabatan	10 Dokumen	8	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	12 Dokumen	120,00
4 05 01 52 07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Jumlah rapat yang terlaksana	4 Kali	3	0 Kali	- Kali	-	0 Kali	3 Kali	75,00
4 05 01 52 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan	1 kali pelaksanaan pemberian penghargaan	0	0 kali pelaksanaan pemberian penghargaan	- kali pelaksanaan pemberian penghargaan	-	0 kali pelaksanaan pemberian penghargaan	- kali pelaksanaan pemberian penghargaan	-
4 05 01 52 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani	9 Kali penanganan	0	0 Kali penanganan	- Kali penanganan	-	0 Kali penanganan	- Kali penanganan	-
4 05 01 52 11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugs belajar dan ikatan dinas	7 Orang	80	11 orang	11 orang	100,00	11 orang	102 orang	1.457,14
4 05 01 52 13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	jumlah ASN yang mengikuti diklat	354 Pegawai		144 kali pelaksanaan diklat	143 kali pelaksanaan diklat	-	144 Pegawai	287 Pegawai	81,07
4 05 01 52 14	Pengembangan Diklat(Analisi Kebutuhan Diklat, penyusunan Silabi, Penyusunan Modul,	Jumlah Analisis kebutuhan diklat/ kesenjangan kompetensi	1 Dokumen		dokumen	- dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	200,00
4 05 01 52 22	Pemrosesan Pensiun Pegawai	Jumlah pemrosesan pensiun pegawai	100 berkas		200 berkas	200 berkas	-	200 berkas	400 berkas	400,00
4 05 01 52 23	Pengangkatan dan Pindahan Pegawai ASN	Jumlah Pelaksanaan Pindah tugas, pelantikan dan lelang jabatan struktural	27 kali pelaksanaan	20	4 kali pelaksanaan	3 kali pelaksanaan	75,00	4 kali pelaksanaan	27 kali pelaksanaan	100,00
4 05 01 53 24	Penyelenggaraan Diklat Dasar ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	189 orang CPNSD		188 orang CPNSD	188 orang CPNSD	-	188 orang CPNSD	376 orang CPNSD	198,94



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
4 05 01 53 25	Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah aparatur yang mengikuti Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	-	50 Orang	100 Orang	200,00
4 05 01 53	PROGRAM PEMBINAAN, PENINGKATAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN APARATUR	PROSENTASE PEMBINAAN, PENINGKATAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN APARATUR								
4 05 01 53 01	penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang undangan	jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan	3 kali	2	0 kali	- kali	-	0 kali	2 kali	66,67
4 05 01 53 02	penanganan kasus pelanggaran disiplin dan perceraian ASN	jumlah kasus yang ditangani	87 kasus	62	10 kasus	10 kasus	100,00	10 kasus	82 kasus	94,25
4 05 01 53 03	proses pemeriksaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil	jumlah pegawai sakit yang tertangani	18 orang PNS	12	4 orang PNS	4 orang PNS	100,00	4 orang PNS	20 orang PNS	111,11
4 05 01 53 04	peningkatan sistem kinerja pegawai	jumlah sistem pendukung penilaian	4 kali kegiatan	4	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	100,00	1 kali kegiatan	6 kali kegiatan	150,00
4 05 01 53 05	asistensi kinerja pegawai	Jumlah pelaksanaan asistensi kinerja	22 kali	22	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	24 kali	109,09
4 05 01 53 06	Penghargaan pegawai ASN	Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan satya lencana karya satya	254 kali	3	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	5 kali	1,97
4 05 01 53 07	pelaksanaan sumpah/ janji ASN	Jumlah ASN yang disumpah	900 orang	351	0 orang	- orang	-	0 orang	- orang	-
4 05 01 53 08	pemrosesan karis, karsu, karpeng dan taspen	Jumlah pemrosesan karis, karsu, karpeng dan Taspen	650 kali	400	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	402 kali	61,85
4 05 01 53 10	penyelenggaraan konseling pegawai	jumlah pegawai yang mengikuti program konseling	60 orang pns	30	0 orang pns	- orang pns	-	0 orang pns	- orang pns	-
4 05 01 53 11	pembinaan kepribadian Aparatur	jumlah pelaksanaan kegiatan	92 kali	88	12 kali	43 kali	358,33	11 kali	- kali	-
4 05 01 54	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI DAN FASILITASI KEPANGKATAN/PURNA TUGAS	CAKUPAN SISTEM INFORMASI DAN FASILITASI KEPANGKATAN/ PURNA TUGAS								
4 05 01 54 01	fasilitasi kenaikan pangkat ASN	jumlah usulan kenaikan pangkat	82 orang	17	0 orang	- orang	-	0 orang	17 orang	20,73
4 05 01 54 02	pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	jumlah dokumen updating sistem informasi kepegawaian daerah	4 data	3	1 data (16 kali Pelaksanaan)	1 data (16 kali Pelaksanaan)	100,00	1 data	5 data	125,00
4 05 01 54 03	pemrosesan pensiun ASN	jumlah pemrosesan pensiun pegawai	400 orang	300	0 orang	- orang	-	0 orang	300 orang	75,00
4 05 01 55	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU	CAKUPAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU								
4 05 01 55 01	Fasilitas dan Koordinasi pelayanan kepegawaian	jumlah fasilitasi dan koordinasi pelayanan kepegawaian	6 kali	4	0 kali	- kali	-	0 kali	4 kali	66,67
4 05 01 55 02	Pelayanan administrasi kepegawaian	jumlah layanan administrasi kepegawaian	48 kali	36	0 kali	- kali	-	0 kali	36 kali	75,00



2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Perangkat Daerah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru. Keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.1.



TABEL 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	Catatan Analisis
				(n-2) Tahun 2020	(n-1) Tahun 2021	(n) Tahun 2022	(n+1) Tahun 2023	(n-3) Tahun 2019	(n-2) Tahun 2020	(n-1) Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu taspen			5	0	0	0	0	0		perubahan prosedur layanan taspen langsung berurusan ke taspen
2	Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu Pegawai			66	66	66	66	84	43		
3	Jumlah layanan pengajuan usul piagam penghargaan SLKS 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun			287	287	287	287	208	300		
4	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu suami (karsu) dan kartu isteri (karis)			123	123	123	123	126	152		
5	Melaksanakan Diklat Manajemen Usaha bagi PNS yang purna tugas (Diklat Purna Tugas)			-	-	-	-	-	-		
6	Jumlah Layanan pengajuan izin cuti										
	a. Izin cuti tahunan			63	63	63	63	297	441		
	b. Izin cuti besar			1	1	1	1	66	66		
	c. Izin cuti sakit			5	4	4	4	43	25		
	d. Izin cuti bersalin			33	33	30	30	9	50		
	e. Izin cuti karena alasan penting			62	62	62	62	41	41		
	f. Izin cuti diluar tanggungan negara										
7	Jumlah Layanan Pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perkawinan			3	3	3	3	16	-		
8	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perceraian			5	4	4	4	19	14		
9	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa			3	3	3	3	3	1		
10	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa			1	1	1	1	-	-		
11	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pensiun PNS										



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	Catatan Analisis
				(n-2) Tahun 2020	(n-1) Tahun 2021	(n) Tahun 2022	(n+1) Tahun 2023	(n-3) Tahun 2019	(n-2) Tahun 2020	(n-1) Tahun 2021	
	a. Pensiun BUP			36	36	36	36	109	159		
	b. Pensiun atas permintaan sendiri			12	12	12	12	15	9		
	c. Pensiun Janda/ Duda/ Yatim			8	5	5	5	31	30		
	d. Pensiun dipercepat sakit/ keuzuran			1	1	1	1	2			
	e. Pensiun Anumerta/ tewas dalam tugas			1	1	1	1	-			
12	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pengajuan cetak ke-2 dan perbaikan konversi NIP			-	-	-	-	-	-		
13	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu pegawai elektronik (KPE)			-	-	-	-	-	-		
14	Jumlah Layanan kenaikan pangkat PNS			803	803	803	803	848	478		
15	Jumlah Layanan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala			1760	1760	1760	1760	1824	2128		
16	Jumlah layanan usul pencantuman gelar PNS			30	30	30	30	29	27		
17	Jumlah Layanan usul ujian dinas tingkat I dan tingkat II			20	20	20	20	-	37		
18	Jumlah Layanan usul peninjauan masa kerja (PMK)			20	20	20	20	8	9		
19	Jumlah layanan pemindahan/mutasi PNS atas permohonan sendiri										
	a. Pindah Tugas PNS Mutasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru			15	15	15	15	133	61		
	b. Pindah Tugas PNS mutasi keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru			8	8	5	5	26	8		
	c. Pindah tugas PNS mutasi dari luar lingkungan Pemerintah kabupaten Kotabaru			1	1	1	1	4	4		
20	Jumlah Layanan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu										
	a. Pengangkatan JF melalui perpindahan JF yang serumpun maupun beda rumpun			1	1	1	1	-	-		
	b. Pengangkatan kembali karena dalam waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan			1	1	1	1	1	-		
	c. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon)			2	2	2	2	-	-		
	d. Pembebasan Sementara karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon)			1	1	1	1	-	-		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				(n-2) Tahun 2020	(n-1) Tahun 2021	(n) Tahun 2022	(n+1) Tahun 2023	(n-3) Tahun 2019	(n-2) Tahun 2020	(n-1) Tahun 2021		
	e. Tunjangan Jabatan Fungsional karena perubahan Peraturan Presiden			35	35	35	35	24	4			
	f. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh diluar JF/mutasi keluar daerah											
	g. Pembebasan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan			5	2	5	5	1	2			
	h. Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit selama 5 (lima) tahun			1	1	1	1	-	-			
	1. Pemberhentian dari JF karena alasan kesehatan								1			
	j. Pemberhentian dari JF karena dalam waktu 6 (enam) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit			4	4	4	4	-	-			
	k. Pengangkatan dalam JF jenjang utama			1	1	1	1	-	-			
	l. Pengangkatan dalam JF melalui inpassing			1	1	1	1	2	-			
	m. Pengangkatan JF melalui perpindahan dari JFU menjadi JFT			1	1	1	1	-	-			
	n. Pengangkatan kembali karena selesai mengikuti tugas belajar			5	5	5	5	6	5			
	o. Pengangkatan pertama kali dalam JF melalui formasi CPNS			15	15	15	15	100	6			
	p. Penyesuaian JF tingkat Terampil menjadi JF tingkat ahli			22	20	20	20	5	6			
	q. Penyesuaian kenaikan Jabatan Fungsional			100	100	100	100	187	101			
21	Jumlah layanan penempatan PNS setelah tugas belajar			1	1	1	1	11	6			
22	Jumlah layanan Penunjukan PNS tugas belajar			10	10	10	10	18	6			
23	Jumlah layanan usul perbaikan SK			13	2	7	7	-	-			
24	Jumlah layanan PNS izin belajar			30	30	30	30	20	5			
25	Jumlah layanan usul pengangkatan CPNS menjadi PNS			80	80	80	80	-	232			
26	Jumlah layanan penawaran diklat ke SKPD dan penerbitan surat perintah mengikuti diklat			3	10	7	7	2	-			
27	Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Prajabatan Golongan I,II,III			75	75	75	75	44	188			
28	Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Kepemimpinan tingkat II,III,IV			16	16	16	16	13	11			



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cakupan data masing-masing bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.2



TABEL DATA 2.2.2.1
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN					
	- TEGURAN LISAN	-	-	-	-	-
	- TEGURAN TERTULIS	-	6	-	-	10
	- PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	-	-	-	-	-
2	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG	-	-	-	-	-
	- PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
	- PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	1	-	1	-	-
	- PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
3	HUKUMAN DISIPLIN BERAT	-	-	-	-	-
	- PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 3 TAHUN	-	-	-	-	1
	- PEMBEBASAN JABATAN	-	-	1	-	-
	- PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENUNDAAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH	-	-	-	-	-
	- PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT UNTUK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS	-	1	5	-	-
	- PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PNS	-	3	2	11	-



TABEL DATA 2.2.2.1.1
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KARTU PEGAWAI	46	66	91	84	43
2	KARTU SUAMI	95	62	63	61	78
3	KARTU ISTERI	141	61	62	84	74
4	KARTU TASPEN	51	5	6	-	
5	CUTI :					
	- CUTI TAHUNAN	112	63	304	297	441
	- CUTI BESAR	-	1	50	66	66
	- CUTI SAKIT	8	4	26	43	25
	- CUTI BERSALIN	5	3	35	9	50
	- CUTI ALASAN PENTING	82	62	47	41	41
6	SK SUMPAH DAN JANJI PNS	200	68	112	-	

TABEL DATA 2.2.2.1.2
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SATYA LANCANA KARYA SATYA					
	- 10 TAHUN	74	173	201	208	211
	- 20 TAHUN	20	47	59	86	40
	- 30 TAHUN	30	67	59	67	49
2	SK IJIN PERNIKAHAN	22	3	21	26	9
3	SK IJIN PERCERAIAN	12	4	13	19	14



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



TABEL 2.2.2.1.3
DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI
DATA PNSD KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2016- 2020

6

NO	TINGKAT	TAHUN									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	D-1	12	17	12	16	11	14	6	5	5	5
2	D-2	327	260	320	254	301	243	213	142	202	133
3	D-3/sarmud	201	410	195	395	184	444	158	396	144	389
4	D-4	51	17	51	16	46	14	38	44	37	45
5	S-1	1102	1068	871	824	824	804	1009	1065	980	1058
6	S-2	158	44	143	41	141	46	196	79	188	77
7	S-3	1	0			2		4		4	
8	sarmud										
9	SD	77	4	75	4	63	3	49	3	46	2
10	SLTA	918	471	853	452	777	417	669	333	630	319
11	SLTP	103	15	97	14	83	12	67	10	64	9
JUMLAH		2950	2306	2617	2016	2432	1997	2409	2077	2300	2037
		5256		4633		4429		4486		4337	



TABEL 2.2.2.2
CAKUPAN DATA BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

NO	JENIS DIKLAT	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	DIKLAT PIM					
	- TINGKAT II	5	-	-	-	-
	- TINGKAT III	11	4	5	4	-
	- TINGKAT IV	36	12	8	9	11
2	DIKLAT PRAJABATAN					
	- GOLONGAN I DAN II	9	14	75	31	6
	- GOLONGAN III	65	2	5	13	182
3	CALON PRAJA IPDN YANG MENDAFTAR	-	-	-	0	0
4	CALON PRAJA IPDN YANG LULUS SELEKSI	-	-	-	-	-
5	DIKLAT TEKNIS YANG DIKUTI (BKPPD Penyelenggara)	30	21	40	121	116
6	DIKLAT TEKNIS (Instansi Luar Penyelenggara)	-	-	14	52	15
7	DIKLAT FUNGSIONAL (Instansi Luar Penyelenggara)	-	-	-	21	1

TABEL 2.2.2.2.1
CAKUPAN DATA BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

NO	JENIS DIKLAT	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SK TUGAS BELAJAR					
	- D3	1	-	-	-	
	- S1 / D IV	6	5	1	10	4
	- S2	11	2	4	7	2
	- S3	-	-	-	-	
2	IZIN BELAJAR					
	- PAKET C	9	-	-	-	34
	- D3	4	-	-	-	7
	- S1	60	5	2	15	229
	- S2	5	3	4	5	37
	- S3	-	1	-	-	1
3	JUMLAH PELAMAR CPNS	-	-	-	2.541	
4	JUMLAH CPNS LULUS ADMINISTRASI	-	-	-	2.120	
5	JUMLAH CPNS LULUS SELEKSI	-	-	-	-	275
6	JUMLAH CPNS YANG DITEMPATKAN	-	80	-	-	132



TABEL 2.2.2.3
DATA BIDANG MUTASI DAN OPROMOSI
DATA PNSD KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK KENAIKAN PANGKAT
TAHUN 2016- 2020

NO	TINGKAT	TAHUN									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER
1	GOLONGAN I	3	2	30	7	7	8	14	9	4	2
2	GOLONGAN II	87	50	243	69	103	109	177	78	58	28
3	GOLONGAN III	199	177	131	267	118	290	331	161	196	130
4	GOLONGAN IV	37	19	14	42	21	47	57	21	41	19
JUMLAH		326	248	418	385	249	454	579	269	299	179
		574		803		703		848		478	

TABEL 2.2.2.3.1
DATA BIDANG MUTASI DAN OPROMOSI
DATA PNS KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK GAJI BERKALA
TAHUN 2016- 2020

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	GOLONGAN I	48	32	18	28	39
2	GOLONGAN II	567	456	284	379	518
3	GOLONGAN III	1028	850	581	964	1200
4	GOLONGAN IV	329	422	191	453	371
JUMLAH		1972	1760	1074	1824	2128



TABEL 2.2.2.3.2
DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
DATA PNS KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN BATAS USIA PENSIUN
TAHUN 2019-2023

NO	GOLONGAN	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	GOLONGAN I	2	-	3	-	-	-	3	-	2	
2	GOLONGAN II	11	-	11	2	12	3	11	1	9	2
3	GOLONGAN III	31	13	46	11	55	16	40	8	32	20
4	GOLONGAN IV	34	11	38	10	68	31	61	27	49	25
JUMLAH		78	24	98	23	125	50	115	36	92	47
		102		121		175		151		139	

TABEL 2.2.2.3.3
DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
DATA PNS KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK PENSIUN
TAHUN 2016- 2020

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PENSIUN NORMAL	64	36	93	115	159
2	PENSIUN JANDA	17	10	28	22	25
3	PENSIUN DUDA	3	2	8	8	5
4	PENSIUN DINI	3	1	10	9	9
5	PENSIUN KEUJURAN	1		1	1	
6	PENSIUN ANUMERTA	1		-		
JUMLAH		89	49	140	155	198

TABEL 2.2.2.3.4
DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
TAHUN 2016- 2020

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	DATA MUTASI:					
	ke luar pemkab Kotabaru					
	- KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	1	1	-	
	- KE PROVINSI	2	7	2	5	4
	- KAB/ KOTA	22	13	9	19	8
	- LUAR PROVINSI	5	6	1	2	8
	ke lingkungan pemkab Kotabaru	-	-	-		
	- Provinsi/ Kab Kota	2	4	2	2	4
	- PEGAWAI PUSAT MENJADI PNSD	-	-	2	2	
	Mutasi Internal	-	-	-	133	63



TABEL 2.2.2.4
DATA UMUM BKPSDM KABUPATEN KOTABARU

1. Data Kepegawaian

a. Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	S.1	S.2	Jumlah
1	IV	0	0	0	0	0	0	1	3	4
2	III	0	0	1	0	0	1	17	4	23
3	II	0	0	11	0	0	4	1	0	16
4	I	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	NON PNS	0	0	6	0	0	0	5	0	11
	Jumlah	1	0	18	0	0	5	24	7	55

b. Berdasarkan Jabatan dan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan	II/b	0	
2	Sekretaris	III/a	1	
3	Kepala Bidang	III/b	3	
4	Kepala Sub Bidang / Bagian	IV/a	11	
5	Pelaksana		29	

c. Diklat - diklat / Bimtek yang telah diikuti oleh SDM di BKPSDM Kab.Kotabaru

No	Diklat Yang Diikuti	Jumlah	Lama Diklat/ Bimtek	Keterangan
1	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Angkatan I	1 Orang	13 Hari	Tahun 2018
2	Pelatihan Penyusunan Renja dan Renstra	2 Orang	3 Hari	Tahun 2019
3	Pelatihan Manajemen Kearsipan berbasis IT	1 Orang	3 Hari	Tahun 2019



2. Data Perlengkapan dan Aset

a. Jenis dan Jumlah Perlengkapan dan Aset

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	AC Split	1	1	0	0	2012
2	Gelas Tamu	2	2	0	0	2012
3	Gorden	1	1	0	0	2012
4	Jaringan SAPK	1	1	0	0	2012
5	Karpet	1	1	0	0	2012
6	Lap Top	5	5	0	0	2012
7	Lemari Kayu	3	3	0	0	2012
8	Mouse + Keyboard	1	1	0	0	2012
9	Pagar Parkir	1	1	0	0	2012
10	Printer	3	3	0	0	2012
11	Rak Buku	3	3	0	0	2012
12	Rak Helm	2	2	0	0	2012
13	Rak Sound System	1	1	0	0	2012
14	Rak TV	1	1	0	0	2012
15	Struktur BKD	1	1	0	0	2012
16	Televisi LCD	1	1	0	0	2012
17	Tempat Kue	1	1	0	0	2012
18	Teralis	4	4	0	0	2012
19	UPS	1	1	0	0	2012
20	AC	1	1	0	0	2013
21	Anjungan BKD	1	1	0	0	2013
22	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2013
23	Dispenser	2	2	0	0	2013
24	DUK	1	1	0	0	2013
25	Gorden Vertical	1	1	0	0	2013
26	Komputer Lap Top	6	6	0	0	2013
27	Komputer PC	4	4	0	0	2013
28	Kulkas	1	1	0	0	2013
29	Kursi Kerja Biasa	5	5	0	0	2013
30	Kursi Komputer	4	4	0	0	2013
31	Kursi Tamu	1	1	0	0	2013
32	Lemari Aluminium	1	1	0	0	2013
33	Meja Kerja	5	5	0	0	2013
34	Meja Komputer	4	4	0	0	2013
35	Mesin Ketik	1	1	0	0	2013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
36	Printer Dot Matrik	1	1	0	0	2013
37	Printer Injek	5	5	0	0	2013
38	Struktur BKD	1	1	0	0	2013
39	UPS	4	4	0	0	2013
40	Vacum Clenner	1	1	0	0	2013
41	AC Split	2	2	0	0	2014
42	Kursi Pejabat Eselon IV	11	11	0	0	2014
43	Gorden	1	1	0	0	2014
44	Meja Pejabat Eselon IV	11	11	0	0	2014
45	Lemari Arsip	1	1	0	0	2014
46	Kursi Kerja Biasa	60	60	0	0	2014
47	Meja Komputer	60	60	0	0	2014
48	Printer	2	2	0	0	2014
49	Printer Monochrome	1	1	0	0	2014
50	Lemari Mushola	1	1	0	0	2014
51	Lemari Loker	1	1	0	0	2014
52	Kursi Lipat	14	14	0	0	2014
53	Kursi Stanles	2	2	0	0	2014
54	LCD TV	1	1	0	0	2014
55	Alat Pendingin AC	7	7	0	0	2014
56	Komputer PC	60	60	0	0	2014
57	TV LCD 42 Inchi	1	1	0	0	2014
58	Printer	4	4	0	0	2014
59	Printer Monochrome	1	1	0	0	2014
60	Printer Besar	1	1	0	0	2014
61	UPS	60	60	0	0	2014
62	Faximilie	1	1	0	0	2014
63	Gelas	1	1	0	0	2014
64	Gelas Tamu	5	5	0	0	2014
65	Tempat Kue	1	1	0	0	2014
66	CCTV	1	1	0	0	2014
67	Genset	1	1	0	0	2014
68	AC Split	2	2	0	0	2014
69	AC Split 2 PK	4	4	0	0	2014
70	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2014
71	Sekat Ruang Kantor	1	1	0	0	2015



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
72	Pintu Utama Kantor	1	1	0	0	2015
73	PC All in one	5	5	0	0	2015
74	PC All in one (Besar)	1	1	0	0	2015
75	UPS	3	3	0	0	2015
76	Scanner	1	1	0	0	2015
77	Batterai Lapotop	5	5	0	0	2015
78	Server	1	1	0	0	2015
79	Lemari Arsip Diklat	3	3	0	0	2015
80	Lemari Arsip Kepangkatan	1	1	0	0	2015
81	Lemari Arsip Umpeg	1	1	0	0	2015
82	Gordyn	1	1	0	0	2015
83	Karpet lantai	1	1	0	0	2015
84	Taplak Meja	1	1	0	0	2015
85	Sound System	1	1	0	0	2015
86	Kursi Tamu	2	2	0	0	2015
87	Lemari Sound System	1	1	0	0	2015
88	Lemari Arsip Pejabat	1	1	0	0	2015
89	Papan Visual	1	1	0	0	2015
90	Papan data Kepegawaian	1	1	0	0	2015
91	Papan Struktur BKD	1	1	0	0	2015
92	Blender	1	1	0	0	2015
93	tangga Aluminium	1	1	0	0	2015
94	Dispenser	2	2	0	0	2015
95	TV Plasma	1	1	0	0	2015
96	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2015
97	Genset	1	1	0	0	2015
98	Jaringan LAN	1	1	0	0	2015
99	Mesin Fotocopy dengan kertas double Folio	1	1	0	0	2016
100	Mesin Absensi	1	1	0	0	2016
101	Penghancur Kertas	1	1	0	0	2016
102	Meja Reseptionis	1	1	0	0	2016
103	Kursi Tamu	2	2	0	0	2016
104	Mobilier lainnya/ Tulisan dinding	1	1	0	0	2016
105	Mobilier lainnya/ Rumah Ginset	1	1	0	0	2016
106	Kursi Kerja	6	6	0	0	2016
107	Dinding/ Sekat Plastik	1	1	0	0	2016



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
108	Karpet	1	1	0	0	2016
109	AC Split1/2 PK	1	1	0	0	2016
110	AC Split 1 PK	1	1	0	0	2016
111	Kipas Angin	1	1	0	0	2016
112	Alat Dapur lain	1	1	0	0	2016
113	Televisi LCD	1	1	0	0	2016
114	Panel	1	1	0	0	2016
115	Sarung Komputer	1	1	0	0	2016
116	Teralis Besi	1	1	0	0	2016
117	P.C Unit Komputer PC	1	1	0	0	2016
118	Printer	5	5	0	0	2016
119	UPS	2	2	0	0	2016
120	Rouner	1	1	0	0	2016
121	HUB	1	1	0	0	2016
122	RJ-45	2	2	0	0	2016
123	Plug-Book	2	2	0	0	2016
124	Crimping Tool	1	1	0	0	2016
125	Tester	1	1	0	0	2016
126	Klem Kabel	20	20	0	0	2016
127	Radio Acces Point	4	4	0	0	2016
128	Wireles LAN	1	1	0	0	2016
129	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0	0	2016
130	Meja Kerja	6	6	0	0	2016
131	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	8	0	0	2016
132	Encyclopedia,Kamus, Buku Referensi	7	7	0	0	2016
133	Buku Agama Islam	3	3	0	0	2016
134	Buku Ekonomi	3	3	0	0	2016
135	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2	2	0	0	2016
136	Mesin Absensi	58	58	0	0	2017
137	Mesin Absensi	44	44	0	0	2018
138	Printer	7	7	0	0	2018
139	UPS	3	3	0	0	2018
140	Mouse	1	1	0	0	2018
141	Lap Top	3	3	0	0	2018
142	Note Book	1	1	0	0	2018



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
143	Hard Disk Internal	1	1	0	0	2018
144	Komputer PC	2	2	0	0	2018
145	Monitor Komputer	1	1	0	0	2018
146	Kursi Esselon III	2	2	0	0	2018
147	Lemari Kaca	5	5	0	0	2018
148	Meja Kerja	1	1	0	0	2018
149	Kursi Esselon IV	2	2	0	0	2018
150	Keyboard dan mouse	9	9	0	0	2018
151	UPS	23	23	0	0	2018
152	Kabel Power dan Adaptor	6	6	0	0	2018
153	Alat Pemadam	2	2	0	0	2018
154	AC	2	2	0	0	2018
155	Buku Manajemen Kinerja	1	1	0	0	2019
156	Buku Undang Undang ASN Aparatur	1	1	0	0	2019
157	Buku Pengadaan Barang / Jasa	1	1	0	0	2019
158	Buku Belajar Singkat PHP 7	1	1	0	0	2019
159	Buku Komputer Grafik / Design	1	1	0	0	2019
160	Buku Sakti Kuasai Exsel	1	1	0	0	2019
161	Buku Iktisar Bahasa Tubuh	1	1	0	0	2019
162	Mesin Absen dan Perlengkapannya	0	0	0	0	2019
163	LAN (Lokal Area Network)	2	2	0	0	2019
164	Personal Komputer Lain-Lain (RJ45Ubility)	1	1	0	0	2019
165	Adapter PC	4	4	0	0	2019
166	Kabel Power Adapter PC	6	6	0	0	2019
167	Keyboard	2	2	0	0	2019
168	UPS	6	6	0	0	2019
169	Mouse	5	5	0	0	2019
170	Server	1	1	0	0	2019
171	Router	1	1	0	0	2019
172	Mesin Absen	8	8	0	0	2020
173	Batteray Mesin Absen	10	10	0	0	2020
174	Adaptor Mesin Absen	10	10	0	0	2020
174	UPS	1	1	0	0	2020
Total		452	778	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3. Data- data terkait hasil pekerjaan

a. Kegiatan yang dilaksanakan

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bagian / Bidang	Keterangan
1	Diklat Prajabatan	Pengembangan Kompetensi Aparatur	
2	Diklat Kepemimpinan	Pengembangan Kompetensi Aparatur	
3	Diklat Teknis dan Kepemimpinan	Pengembangan Kompetensi Aparatur	
4	Pengiriman PNS Tugas Belajar Utusan Pemkab Kotabaru	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
5	Pemberian Ijin Belajar	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
6	Sosialisasi peraturan kepegawaian	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
7	Rapat tim MPPHD	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
8	Rapat tim Evaluasi Kinerja PNS	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
9	Training Bintal	Sekretariat	
10	Penyelenggaraan Konseling Pegawai	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
11	Out Bound	Sekretariat	
12	Pemeriksaan Kesehatan Bagi PNS	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
13	Verifikasi Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
14	Verifikasi satya lencana karya satya	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
15	Sumpah / janji PNS	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
16	Asistensi Sistem Kinerja Pegawai	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
17	Pelantikan Pejabat Struktural	Mutasi dan Promosi	
18	Rapat Tim Baperjakat dan Sekretariat Baperjakat	Mutasi dan Promosi	
19	Assetment PNS	Mutasi dan Promosi	
20	Pengelola Fasilitas PNS Pindah Tugas	Mutasi dan Promosi	
21	Seleksi Penerimaan CPNS	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
22	Penempatan PNS	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
23	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
24	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai ASN	Mutasi dan Promosi	
25	Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	Mutasi dan Promosi	
26	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Mutasi dan Promosi	
27	Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Mutasi dan Promosi	
28	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
29	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat ASN	Mutasi dan Promosi	
30	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satu Pintu	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	

b. Daftar Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati

No	Judul Perda / Perbup	Nomor Perda/Perbup	Tanggal	Bagian/Bidang
1	Tata Cara , Persyaratan Pemberian Ijin Belajar, dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	55 Tahun 2012	01 Mei 2012	Pengembangan Pegawai
2	Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Periode 2012-2015	42 Tahun 2012	03 Februari 2012	Pengembangan Pegawai
3	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	59 Tahun 2012	15 Juni 2012	Pengembangan Pegawai



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Judul Perda / Perbup	Nomor Perda/Perbup	Tanggal	Bagian/Bidang
4	Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru No 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembeian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	14 Tahun 2015	30 Januari 2015	Pengembangan Pegawai
5	Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan kabupaten Kotabaru	68 Tahun 2016	27 oktober 2016	Pengembangan Pegawai
6	Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/770/KUM/2013	31 Desember 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
7	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	31 Tahun 2013	31 Desember 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
8	Pemberian Tunjangan kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	31 Tahun 2013	17 Juni 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
9	Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45.796.KUM Tahun 2015	31 Desember 2015	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
10	Perubahan atas Keputusan Bupati Kotabaru tentang Upah Bulanan Tenaga Non PNS	188.45.187.KUM Tahun 2016	07 Januari 2016	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
11	Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Keputusan Bupati Kotabaru tentang Upah Bulanan Tenaga Non PNS Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	30 Tahun 2015	06 Juli 2015	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
12	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional	21 Tahun 2014	19 Maret 2014	Kepangkatan dan Pensiun
13	Tata Cara Perolehan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kotabaru	69 Tahun 2016	07 Nopember 2016	Kepangkatan dan Pensiun
14	Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	27 Tahun 2017	6 Oktober 2017	Kepangkatan dan Pensiun
15	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	28 Tahun 2016	24 Oktober 2016	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
16	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru nomor 188.45/796/KUM/2015 tentang Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/011/KUM/2017	16 Januari 2017	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
17	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	8 Tahun 2017	Januari 2017	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
18	Keputusan Bupati kotabaru Tentang Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Mengikuti	188.45/062/KUM/2018	30 Januari 2018	Pengembangan Kompetensi Aparatur
19	Keputusan Bupati kotabaru Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Angkatan Pertama Utusan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018	188.45/344/KUM/2018	5 Maret 2018	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
20	Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	17 tahun 2019	25 Pebruari 2019	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
21	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188,45/376/KUM/2019 Tentang Pembentukan tim penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Kotabaru	188.45/376/KUM/2019	30-Apr-19	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah masih belum Optimalnya Kinerja ASN dan Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Didapat dari Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Manajemen Perangkat Daerah yaitu Belum tercapainya kinerja pembangunan disebabkan Aspek ketersediaan SDM Aparatur.

Faktor penyebab masalah yaitu:

1. Kurangnya jumlah aparatur/PNS pada satuan kerja perangkat daerah
2. Kompetensi PNS yang belum memadai
3. Penempatan ASN tidak sesuai Kompetensi

Upaya yang sudah dilakukan yaitu:

1. Pengadaan ASN baru
2. Peningkatan Kompetensi ASN melalui kegiatan Diklat, Bimtek, Pemagangan dan Lomba
3. Uji Kompetensi pelaksanaan ASN

Pada Program Nasional pada agenda Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.



Tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru selaras dengan program nasional yaitu Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.



2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada lampiran tabel 2.4



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
KABUPATEN KOTABARU

SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
	BELANJA		BELANJA			35.871.474.902	BELANJA			35.871.474.902
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Sekretariat)	Pulau Laut Utara	Lancarnya Administrasi kantor	100	persen	19.137.905.782	Lancarnya Administrasi kantor	100	persen	19.137.905.782
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk	4.527	jumlah surat	26.520.000	Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk	4.527	jumlah surat	26.520.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73	kali pembayaran rekening	111.930.000	Jumlah pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73	kali pembayaran rekening	111.930.000
03	Penyediaan Jasa perlengkapan dan peralatan kantor		jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	-	kali	3.444.000	jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	-	kali	3.444.000
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	14	kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit	12.641.265	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	14	kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit	12.641.265
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan dan dokumen	24	kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)	864.792.000	Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan dan dokumen	24	kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)	864.792.000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah pembayaran tenaga kebersihan kantor	58	orang kali pembayaran	88.902.127	Jumlah pembayaran tenaga kebersihan kantor	58	orang kali pembayaran	88.902.127
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	115	kali jasa perbaikan peralatan kerja	8.143.892	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	115	kali jasa perbaikan peralatan kerja	8.143.892



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12	kali penyediaan ATK (set)	68.481.622	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12	kali penyediaan ATK (set)	68.481.622
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6	kali penyediaan barang cetak dan	55.560.791	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6	kali penyediaan barang cetak dan	55.560.791
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah kali penyediaan komponen Instalasi Listrik dan alat listrik	6	kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)	19.448.000	Jumlah kali penyediaan komponen Instalasi Listrik dan alat listrik	6	kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)	19.448.000
13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)	10.454.691	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)	10.454.691
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan	12	kali terbitan	6.855.455	Jumlah penyediaan bahan bacaan	12	kali terbitan	6.855.455
17	Penyediaan Makanan dan Minuman		jumlah penyediaan makanan minuman harian karyawan, rapat dan jamuan tamu	16.566	Kali penyediaan	303.789.046	jumlah penyediaan makanan minuman harian karyawan, rapat dan jamuan tamu	16.566	Kali penyediaan	303.789.046
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45	kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	458.226.468	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45	kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	458.226.468
19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran /Keamanan		jumlah pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	1.200	jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	16.865.400.000	jumlah pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	1.200	jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	16.865.400.000
21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		Jumlah rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	60	kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	182.325.938	Jumlah rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	60	kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah	182.325.938
22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda		Jumlah iklan/pengumuman yang dipasang di media massa	20	Kali iklan/pengumuman yang dipasang di	9.116.297	Jumlah iklan/pengumuman yang dipasang di media massa	20	Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/	9.116.297



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
25	Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan		Jumlah pelaksanaan pameran/publikasi dan penyediaan data kepegawaian SKPD	3	kali pelaksanaan pameran	41.874.190	Jumlah pelaksanaan pameran/publikasi dan penyediaan data kepegawaian SKPD	3	kali pelaksanaan pameran	41.874.190
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Sekretariat)		Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	87	persen	409.158.393	Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	87	persen	409.158.393
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3	unit/buah	12.458.939	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3	unit/buah	12.458.939
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan peralatan kantor	21	Jenis/unit	157.084.613	Jumlah pengadaan peralatan kantor	21	Jenis/unit	157.084.613
10	Pengadaan Mebeleur		Jumlah mebeleur yang diadakan	12	unit/buah	41.934.966	Jumlah mebeleur yang diadakan	12	unit/buah	41.934.966
11	Pengadaan Buku/ Kepustakaan		Jumlah buku/kepuustakaan yang	10	buah buku	3.646.519	Jumlah buku/kepuustakaan yang	10	buah buku	3.646.519
22	Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	kali pemeliharaan	12.155.519	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	kali pemeliharaan	12.155.519
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	56	kali pemeliharaan/ penyediaan(2	120.395.894	jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	56	kali pemeliharaan/ penyediaan(2	120.395.894
26	Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor		jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	46	kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor	42.481.943	jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	46	kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor	42.481.943
28	Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor		jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	35	kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor	19.000.000	jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	35	kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor	19.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (Sekretariat)		Tingkat disiplin aparatur	100	persen	127.233.117	Tingkat disiplin aparatur	100	persen	127.233.117
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	55	stel	46.918.541	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	55	stel	46.918.541
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian batik/ sasirangan yang diadakan	55	baju	28.503.622	Jumlah pakaian batik/ sasirangan yang diadakan	55	baju	28.503.622
06	Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya	55	stel	51.810.954	Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya	55	stel	51.810.954
04	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS (Pangkat pensiun)		Tingkat disiplin aparatur	100	persen	-	Tingkat disiplin aparatur	100	persen	-
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (Sekretariat)		Memberikan bantuan/fasilitasi untuk pegawai yang pindah/purna tugas	100	persen	335.000.000	Memberikan bantuan/fasilitasi untuk pegawai yang pindah/purna tugas	100	persen	335.000.000
03	Bimbingan teknis impelementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur BKD yang mengikuti bimtek	20	orang	300.000.000	Jumlah aparatur BKD yang mengikuti bimtek	20	orang	300.000.000
04	Pembinaan mental dan fisik aparatur		Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	25	kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	35.000.000	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	25	kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	35.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD		Tingkat kualitas laporan kinerja	100	persen	246.247.300	Tingkat kualitas laporan kinerja	100	persen	246.247.300
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	dokumen laporan	139.900.400	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	dokumen laporan	139.900.400
03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD		Jumlah dokumen laporan prognosis	1	dokumen laporan	2.295.000	Jumlah dokumen laporan prognosis	1	dokumen laporan	2.295.000
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	1	laporan dokumen keuangan	9.175.800	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	1	laporan dokumen keuangan	9.175.800
05	Momitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD		Junlah dokemen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun	5	dokumen laporan	58.557.500	Junlah dokemen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun	5	dokumen laporan	58.557.500
06	Penyusunan Laporan Data Pegawai SKPD		Jumlah dokumen informasi kepegawaian	4	dokumen	36.318.600	Jumlah dokumen informasi kepegawaian	4	dokumen	36.318.600
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR		Tingkat Pembinaan dan Pengembangan aparatur	60	persen	12.385.930.310	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan aparatur	60	persen	12.385.930.310
01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS		Jumlah dokumen rencana pembinaan karier PNS	5	dokumen	560.000.000	Jumlah dokumen rencana pembinaan karier PNS	5	dokumen	560.000.000
02	Seleksi Penerimaan Calon PNS		Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dan penempatan PNS	2	Kali pelaksanaan	650.000.000	Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dan penempatan PNS	2	Kali pelaksanaan	650.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
03	Penempatan PNS		Jumlah pelaksanaan penempatan /pelantikan PNS	900	kali pelaksanaan pelantikan	250.000.000	Jumlah pelaksanaan penempatan /pelantikan PNS	900	kali pelaksanaan pelantikan	250.000.000
04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis PNS		Jumlah pelaksanaan periode kenaikan pangkat	635	Orang	550.000.000	Jumlah pelaksanaan periode kenaikan pangkat	635	Orang	550.000.000
	- Pemrosesan Kenpa, KGB, PMK		Jumlah Pemrosesan PNS Naik pangkat, KGB, Pencantuman gelar dam PMK	600	Orang		- Jumlah Pemrosesan PNS Naik pangkat, KGB, Pencantuman gelar dam PMK	600	Orang	-
	- Ujian Dinas tingkat I dan II		Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas TK. I dan II	35	Orang		- Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas TK. I dan II	35	Orang	-
06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS		Jumlah dokumen instrumen analisis jabatan	2	Dokumen	195.000.000	Jumlah dokumen instrumen analisis jabatan	2	Dokumen	195.000.000
07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar		Jumlah rapat yang terlaksana	1	Kali	8.799.360	Jumlah rapat yang terlaksana	1	Kali	8.799.360
	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	354	Pegawai	4.450.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	354	Pegawai	4.450.000.000
	- Pelatihan Perawat/ Bidan tingkat		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	57	Pegawai		- Jumlah ASN yang mengikuti diklat	57	Pegawai	-
	- Pelatihan Guru tingkat		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	57	Pegawai		- Jumlah ASN yang mengikuti diklat	57	Pegawai	-
	- Pelatihan Sertifikasi ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	114	Pegawai		- Jumlah ASN yang mengikuti diklat	114	Pegawai	-
	- Penyertaan diklat teknis/ fungsional sesuai tupoksi		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	40	Pegawai		- Jumlah ASN yang mengikuti diklat	40	Pegawai	-
	- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK II		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	5	Pegawai		- Jumlah ASN yang mengikuti diklat	5	Pegawai	-
	- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK III		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	6	Pegawai		- Jumlah ASN yang mengikuti diklat	6	Pegawai	-



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
	- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK IV		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	18	Pegawai		- Jumlah ASN yang mengikuti diklat	18	Pegawai	-
11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas		Jumlah PNS yang mendapat bantuan	15	orang	1.620.465.000	Jumlah PNS yang mendapat bantuan	15	orang	1.620.465.000
23	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai ASN		Jumlah Pelaksanaan Pindah tugas, pelantikan dan lelang jabatan struktural		kali pelantikan	1.075.000.000	Jumlah Pelaksanaan Pindah tugas, pelantikan dan lelang jabatan struktural		kali pelantikan	1.075.000.000
	- Lelang jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)		Jumlah pelaksanaan lelang JPT	1	pindah tugas		- Jumlah pelaksanaan lelang JPT	1	pindah tugas	-
	- Pelantikan Jabatan		Jumlah pelaksanaan pelantikan jabatan ASN	5	Kali Pelantikan		- Jumlah pelaksanaan pelantikan jabatan ASN	5	Kali Pelantikan	-
	- Fasilitasi pindah tugas ASN		Jumlah ASN Pindah Tugas yang difasilitasi	500	lelang jabatan		- Jumlah ASN Pindah Tugas yang difasilitasi	500	lelang jabatan	-
24	Penyelenggaraan Diklat Dasar ASN		Jumlah ASN yang mengikuti diklat dasar	189	CPNSD	2.500.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dasar	189	CPNSD	2.500.000.000
14	Pengembangan Diklat		Jumlah analisi kebutuhan diklat / kesenjangan kompetensi	1	dokumen	131.665.950	Jumlah analisi kebutuhan diklat / kesenjangan kompetensi	1	dokumen	131.665.950
	Pengadministrasian pegawai Non PNS		Jumlah pegawai Non PNS	1200	Orang		- Jumlah pegawai Non PNS	1200	Orang	-
25	Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah		Jumlah aparatur yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	50	Orang	75.000.000	Jumlah aparatur yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	50	Orang	75.000.000
22	Pemrosesan Pensiun Pegawai		Jumlah pemrosesan pemberhentian dan pensiun pegawai	100	berkas	320.000.000	Jumlah pemrosesan pemberhentian dan pensiun pegawai	100	berkas	320.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
	PROGRAM PEMBINAAN, PENINGKATAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN APARATUR		PROSENTASE PEMBINAAN, PENINGKATAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN APERATUR	20	persen	2.395.000.000	PROSENTASE PEMBINAAN, PENINGKATAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN APERATUR	20	persen	2.395.000.000
01	penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang undangan		jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan	3	kali	350.000.000	jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan	3	kali	350.000.000
02	penanganan kasus pelanggaran disiplin dan perceraian ASN		jumlah kasus pelanggaran disiplin dan perceraian ASN yang tertangani	25	kasus	180.000.000	jumlah kasus pelanggaran disiplin dan perceraian ASN yang tertangani	25	kasus	180.000.000
5	proses pemeriksaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil		jumlah pemeriksaan kesehatan bagi ASN yang sakit keras dan jumlah pemeriksaan	3	orang PNS	60.000.000	jumlah pemeriksaan kesehatan bagi ASN yang sakit keras dan jumlah pemeriksaan	3	orang PNS	60.000.000
04	peningkatan sistem kinerja pegawai		jumlah sistem pendukung penilaian	1	Kegiatan	100.000.000	jumlah sistem pendukung penilaian	1	Kegiatan	100.000.000
05	asistensi kinerja pegawai		jumlah kegiatan pendukung pendampingan pengisian penilaian kinerja dan jumlah kegiatan monitoring sistem penilaian kinerja	8	kali kegiatan	210.000.000	jumlah kegiatan pendukung pendampingan pengisian penilaian kinerja dan jumlah kegiatan monitoring sistem penilaian kinerja	8	kali kegiatan	210.000.000
06	penghargaan pegawai ASN		jumlah PNS , yang mendapatkan satya lencana karya satya 10,20 dan 30,tahun PNS berprestasi dan PNS purna tugas	2	kali kegiatan	410.000.000	jumlah PNS , yang mendapatkan satya lencana karya satya 10,20 dan 30,tahun PNS berprestasi dan PNS purna tugas	2	kali kegiatan	410.000.000
	Pemberian penghargaan Satyalencana karya satya		Jumlah pelaksanaan penghargaan Satyalencana karyasatya	1	Kali Pelaksanaan	-	Jumlah pelaksanaan penghargaan Satyalencana karyasatya	1	Kali Pelaksanaan	-



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan praktis ASN			1 Kali Pelaksanaan	-		1 Kali Pelaksanaan	-
07	pelaksanaan sumpah/ janji ASN		Jumlah ASN yang disumpah	350 orang	65.000.000	Jumlah ASN yang disumpah	350 orang	65.000.000
08	pemrosesan karis,karsu,karpeng dan taspen		Jumlah pemrosesan karis, karsu ,karpeg dan Taspen	12 kali kegiatan	115.000.000	Jumlah pemrosesan karis, karsu ,karpeg dan Taspen	12 kali kegiatan	115.000.000
	penyelenggaraan konseling pegawai		jumlah pegawai yang mengikuti program konseling	30 orang	75.000.000	jumlah pegawai yang mengikuti program konseling	30 orang	75.000.000
11	pembinaan kepribadian Aparatur		jumlah pelaksanaan kegiatan	45 kali kegiatan	515.000.000	jumlah pelaksanaan kegiatan	45 kali kegiatan	515.000.000
	Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah		Jumlah Updating Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	1 Dokumen	250.000.000	Jumlah Updating Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	1 Dokumen	250.000.000
	Pelayanan Profesi ASN		Jumlah Profesi ASN yang difasilitasi	12 Kali	65.000.000	Jumlah Profesi ASN yang difasilitasi	12 Kali	65.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU		CAKUPAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU	100 persen	835.000.000	CAKUPAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU	100 persen	835.000.000
01	Koordinasi Pelayanan Kepegawaian		Jumlah Koordinasi data kebutuhan dan pelayanan kepegawaian	2 dokumen	40.000.000	Jumlah Koordinasi data kebutuhan dan pelayanan kepegawaian	2 dokumen	40.000.000
02	Pelayanan administrasi kepegawaian		jumlah dokumen hasil pelayanan administrasi kepegawaian	12 dokumen	795.000.000	jumlah dokumen hasil pelayanan administrasi kepegawaian	12 dokumen	795.000.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2022, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2022 tidak ada.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Kotabaru

Perangkat Daerah : BKPSDM Kabupaten Kotabaru

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2022 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional dikaitkan RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Pemerintah. Prioritas nasional berdasarkan ringkasan eksekutif RPJMN 2020 – 2024 antara lain:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management. Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya



portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha).

Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksi antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Isu strategis dari tata kelola pemerintahan yaitu:

- 1) ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral. Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Data KASN (2018) menunjukkan bahwa dari 74 instansi pemerintah diketahui bahwa hanya terdapat enam kementerian yang telah memiliki sistem merit “Sangat Baik”. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.
- 2) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan, data KemenPANRB (2018) menunjukkan bahwa 47 K/L, 10 provinsi, 64 kab/kota mendapatkan indeks kelembagaan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen kearsipan.
- 3) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Data Ombudsman RI (2018)

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian dari 27,27 persen menjadi 55,56 persen; Lembaga dari 20 persen menjadi 25 persen; provinsi 9,09 persen menjadi 62,5 persen; dan kab/kota dari 5,26 persen menjadi 31,6 persen). Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan.

- 4) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data BPK (2018) menunjukkan adanya peningkatan persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP atas laporan keuangan dari tahun 2015 s/d 2017 (Kementerian/Lembaga dari 65 persen menjadi 55,56 persen; Provinsi dari 85 persen menjadi 97 persen; Kabupaten dari 54 persen menjadi 72 persen; dan Kota dari 65 persen menjadi 86 persen). Selain itu, data KemenPANRB RB (2018) menunjukkan bahwa persentase instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kerjanya “Baik” ke atas cenderung meningkat dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian/Lembaga dari 76,62 persen menjadi 92,77 persen; Provinsi dari 50 persen menjadi 94,12 persen; dan Kabupaten/kota dari 8,60 persen menjadi 46,85 persen). Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.
- 5) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah

Arah kebijakan dan strategi dari pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui :
 - (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah;
 - (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan



- (c) Penyusunan pola karir instansional.
- 2) Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui:
 - (a) Penerapan proses bisnis instansi;
 - (b) implementasi arsitektur SPBE instansi; dan
 - (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.
- 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:
 - (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
 - (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan
 - (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
 - (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu;
 - (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik;
 - (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu;
 - (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik;
 - (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
 - (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D.

Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 pada misi ke dua yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, dengan tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu dari sasaran dari tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi yang telah disusun antara lain :

- 1) Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel
- 2) Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah
- 3) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik

Untuk mewujudkan capaian dari misi kedua RPJMD, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah



Kebijakan daerah tentu mengarah kepada kebijakan nasional dan dalam hal ini Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentunya tidak lepas dari kebijakan daerahnya sendiri yaitu Kabupaten Kotabaru dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai acuannya mengarah kepada Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang mana Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Keterjangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan ekonomi
5. Pengembangan kawasan strategis dan inovasi guna peningkatan daya saing daerah

Untuk Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana prioritas pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021 ada poin ke 1 yaitu Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yaitu :

Kebijakan :

- a. Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru, Analisis lembaga Pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui lembaga yang perlu ada dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dengan melakukan penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif serta membentuk lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat Kabupaten Kotabaru dengan berpijak pada prinsip *sedikit struktur kaya fungsi*.
- b. Penetapan struktur dan proses kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas dan tegas.



- c. Penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas, tegas dan fleksibel.
- d. Rekrutmen, penempatan, promosi, dan mutasi sesuai dengan kualifikasi teknis atau hasil analisis jabatan.
- e. Penataan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan prinsip *"the right man of right job"*.
- f. Peningkatan kompetensi Aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- g. Penetapan kualifikasi Aparatur (bertaqwa, berakhlak, bersih dan kompeten).
- h. Penegakan disiplin kerja, etika dan profesi aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- i. Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya dan Pemerataan Penempatan Aparatur Keseluruh Pedesaan dan Kecamatan.
- j. Sistem pembinaan karir aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang prospektif.
- k. Pemberian *reward* dan *punishment* aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya.
- l. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mencermati lingkungan internal dan eksternal organisasinya.
- m. Meningkatkan tingkat responsivitas (cepat tanggap dan cepat menanggapi) apa yang menjadi masalah, keluhan dan aspirasi masyarakat serta perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal.
- n. Merubah sikap dan perilaku aparatur pemerintah menjadi pelayan masyarakat.
- o. Melakukan *efisiensi penyelenggaraan pemerintahan* baik efisiensi sumber daya manusia, efisiensi sarana maupun efisiensi dana.



- p. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
- q. Peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.
- r. Meningkatkan fungsi dan profesionalitas birokrasi daerah sebagai pelayan masyarakat dan pengelola kekayaan daerah.
- s. Melakukan debirokratisasi dalam pelayanan perijinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur melalui pelayanan satu atap/satu pintu.
- t. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Prioritas dan fokus :

- a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
- b. Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru
- c. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif serta berpijak pada prinsip *sedikit struktur kaya fungsi*
- d. Peningkatan disiplin dan profesionalisme sumber daya manusia
- e. Peningkatan pelayanan prima
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan selalu menciptakan sistem dan inovasi baru
- g. Pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian
- h. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
- i. Peningkatan pembinaan sosial keagamaan
- j. Pemberian subsidi warga yang meninggal dunia



- k. Pengelolaan bebas biaya KTP dan Akte
- l. Optimalisasi pelaksanaan e-KTP
- m. Penerapan Perda SOTK Baru tindak lanjut UU No 23 Tahun 2014
- n. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah
- o. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan serta peningkatan peluang pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru
- p. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)
- q. Pembangunan kantor UPTD Dinas Pendapatan
- r. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD
- s. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD.

Dari uraian diatas RKPD Tahun Anggaran 2022 mengarahkan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memprioritaskan dan fokus pada poin d, yaitu : Peningkatan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Tabel 3.1.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta
Kabupaten Kotabaru

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional	-	-
1.	Peningkatan kualitas manajemen ASN	RPJMN 2020-2024	
2.	Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah	RPJMN 2020-2024	
3.	Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN	RPJMN 2020-2024	
4.	Persentase instansi pemerintah yang menyusun pola karir instansi	RPJMN 2020-2024	
B	Provinsi		
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021	
2	Pembinaan dan pengembangan aparatur		
3	Penataan aparatur		
4	Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen kepegawaian		

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2022 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada lampiran tabel 3.2.



TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Indikator Kinerja Pada Tahun		satuan
					Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	7	7	8
Meningkatkan Kinerja ASN	nilai sasaran kerja pegawai (SKP)	nilai rata-rata SKP BAIK	1 Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	1 Persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi	60	70	persen
			2 Meningkatnya disiplin pegawai ASN	2 Persentase tingkat kedisiplinan ASN	100	100	persen
Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	3 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	3 Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian	83,23	83,45	persen

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program Rutin SKPD terdiri dari 1 program, 7 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Program Prioritas Pembangunan terdiri dari 2 Program, 6 Kegiatan 19 Sub Kegiatan:

1. Program Kepegawaian Daerah

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Sub Kegiatan :
 - a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - g. Pengelolaan Data Kepegawaian
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Sub Kegiatan :
 - a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - b. Pengelolaan Promosi ASN
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - Sub Kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b. Pengelolaan Pemberiaan Penghargaan Bagi Pegawai
 - c. Pembinaan Disiplin ASN
 - d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - e. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai



2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sub Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
 - b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yang direncanakan untuk Periode Tahun 2022 beserta prognosinya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.1



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Prog/Keg	2022		2023	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
						BELANJA DAERAH				31.185.838.833		45.741.776.815
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				22.603.800.783		32.837.376.815
	5	3				KEPEGAWAIAN				22.603.800.783		32.837.376.815
	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				22.603.800.783		32.837.376.815
	5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	11 Dokumen	17.500.000	11 Dokumen	17.010.000
2	5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000
3	5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.500.000
4	5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000
5	5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.500.000
6	5	03	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	8 Dokumen	13.160.000	8 Dokumen	36.318.600
7	5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	20 Dokumen	26.920.000	20 Dokumen	58.557.500
	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
8	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	26 Kali Penyediaan	9.179.895.983	26 kali penyediaan	10.241.416.415
9	5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan	12 Kali Penyediaan	10.693.950.000	12 kali Penyediaan	20.002.600.000
10	5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	24 Dokumen	567.120.000	24 Dokumen	600.000.000
11	5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	4.305.000	2 Dokumen	9.175.800
12	5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 Dokumen	3.249.900	1 Dokumen	3.250.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Prog/Keg	2022		2023	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
	5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
13	5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan		-	55 stel	33.000.000
14	5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan	3 Kali	75.000.000	3 Kali	75.000.000
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
15	5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Kali Penyediaan	21.998.000	6 Kali Penyediaan	22.000.000
16	5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 Kali Penyediaan	120.000.000	24 Kali Penyediaan	120.000.000
17	5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotabaru Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13816 kali penyediaan	299.995.600	13816 kali penyediaan	300.000.000
18	5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Kali Penyediaan	57.035.700	6 kali penyediaan	60.000.000
19	5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Kali Penyediaan	7.200.000	12 Kali Penyediaan	8.500.000
20	5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan	12 Kali Penyediaan	36.000.000	12 Kali Penyediaan	36.000.000
21	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	110 Kali	386.330.000	110 Kali	370.000.000
22	5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kotabaru Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkelola		-	1 Dokumen	25.000.000
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah					
23	5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Kotabaru Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan	3 Jenis/Unit	-	3 Jenis/Unit	45.000.000
24	5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	30 Jenis/Unit	365.779.800	30 Jenis/Unit	265.880.000
25	5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	9 Unit/Buah	52.933.500	9 Unit/Buah	56.000.000
	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah					
26	5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	4527 Kali Penyediaan	26.519.200	4527 Kali Penyediaan	26.520.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Prog/Keg	2022		2023	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
27	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	73 Kali Penyediaan	132.140.600	73 kali Penyediaan	128.600.000
28	5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	124 Kali Penyediaan	336.960.000	124 kali penyediaan	68.160.000
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						
29	5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	24 Kali	89.388.500	24 kali	89.388.500
30	5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Kali	49.929.000	1 kali	75.000.000
31	5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	42 Kali	21.830.000	42 kali	23.000.000
32	5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	26 Kali	18.660.000	26 kali	21.000.000
	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4.669.866.050		4.504.400.000
	5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
33	5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	59.000.000
34	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	80.900.000
35	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	350.808.000	1 Dokumen	420.900.000
36	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 berkas	110.000.000	100 berkas	110.000.000
37	5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	6 Kali	13.200.000	6 Kali	15.000.000
38	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	424.113.350	12 dokumen	350.000.000
39	5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Data Kepegawaian	6 kali	32.255.000	6 kali	36.000.000
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN						
40	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 kali pelaksanaan	250.000.000	3 kali pelaksanaan	250.000.000
41	5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Promosi ASN	10 kali pelaksanaan	503.600.000	10 kali pelaksanaan	503.600.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Prog/Keg	2022		2023	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN						
42	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20 orang	2.100.000.000	20 orang	2.100.000.000
43	5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1000 SK	80.000.000	1000 SK	80.000.000
	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
44	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 kali 1 sistem	526.480.000	8 kali 1 sistem	320.000.000
45	5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1 kali pelaksanaan	44.829.700	1 kali pelaksanaan	45.000.000
46	5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Pembinaan Disiplin ASN	40 kali	67.650.000	40 kali	77.000.000
47	5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 kasus	50.000.000	10 kasus	50.000.000
48	5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	10 kasus	6.930.000	10 kasus	7.000.000
	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.912.172.000		8.400.000.000
	5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis						
49	5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	55 Orang	150.000.000	61 Orang	150.000.000
	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
50	5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
51	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	401 Orang	3.612.172.000	60 Orang	8.100.000.000



BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2022-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan digunakan dalam penyusunan visi dan misi Bupati Kotabaru periode 2022-2026.

Kotabaru,

KEPALA BADAN



Drs. H. MINGGU BASUKI, MAP
NIP. 19731115 199302 1 003